

**ANALISIS KAMPANYE POLITIK TERHADAP
SIKAP PEMILIH PNS KANTOR SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG PADA PILKADA TAHUN 2005**

*The Analisis Political Campaign of Local Election To
The Attitude of Civil Servants In Soppeng Regency 2005*

Marwis

Anggota KPUD Kabupaten Soppeng

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk kampanye politik yang dilakukan calon kepala daerah, dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi sikap pemilih pegawai negeri sipil kantor sekretariat daerah Kabupaten Soppeng untuk selanjutnya dapat menentukan sikap sebagai warga negara yang memiliki hak pilih pada pilkada Tahun 2005. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Karena besarnya jumlah populasi Pegawai Negeri Sipil, sehingga populasi sasaran hanya yang berkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng. Hal ini sekaligus menjadi sampel keseluruhan responden dengan teknik penarikan sampling purposif, yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria dan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sikap pemilih pegawai negeri sipil kantor sekretariat daerah Kab. Soppeng lebih tertarik kepada bentuk komunikasi interpersonal dibandingkan komunikasi massa yang dilakukan para calon kepala daerah bersama tim suksesnya. (2) Faktor-faktor yang dominan memengaruhi dalam menentukan sikap pada pilkada Kabupaten Soppeng, yakni, aspek kepentingan karir, kredibilitas /pencitraan kandidat, program yang ditawarkan kandidat, efektifitas informasi/kampanye, pengaruh keluarga, tetangga,teman sejawat dan terakhir faktor lainnya seperti keinginan sendiri tanpa target tertentu. (3) Terkait sikap dalam memilih pada pelaksanaan pilkada Tahun 2005 lalu, sebanyak 32% menyalurkan hak suaranya kepada pasangan calon A. Soetomo dan A. Sarimin Saransi, disusul 30,0% responden memberikan sikap politiknya ke A.Harta Sanjaya dan Syarifuddin Rauf. Ketiga 12,9% responden ke pasangan A.Munarfah Mappu dan A.Rizal Mappatunru, dan keempat 2,9% untuk pasangan Bismirkin dan Burhanuddin Tajang.

Kata kunci : kampanye politik, pns, pilkada

ABSTRACT

This research aimed to knowing the form of the political campaign that was carried out by the prospective district head with the team of the success, and explained factors that influence the attitude politics the voter of the area of the Soppeng Regency of the civil servant of the secretariat's office henceforth could determine his attitude as the citizen who had the right to vote in Pilkada in 2005. The method used in this research is descriptive-qualitative method. Population of respondents are taken by using quota sampling that is a technical sample collection based on the certain quantity to each levels and then to analyze whatever till to fulfill the quantity. Results of the research showed that 1. Attitudes the voter of the area of the regency of the civil servant of the secretariat's office soppeng more was interested to the form of communication interpersonal was compared by mass communication that was carried out by the prospective district heads with the team of the success. 2. Dominant factors influenced in distributing his attitude in pilkada: the interests carier, the credibility/branding candidate, the program that was offered candidate, the effectiveness of information/campaign, the influence family, neighbours, friends the colleague and finally the other factor like the wish personally without the certain goal. 3. It was related that his attitude in the implementation pilkada last 2005, as many as 32% distributed his voting rights to the couple A.Soetomo and A.Sarimin Saransi, was followed 30.0% the respondent stated his attitude to A.Harta Sanjaya and Syarifuddin Rauf. Thirdly, 12.9% the respondent to the couple A.Munarfah Mappu and A.Rizal Mappatunru now the last level of the choice of the respondent totalling 2.9% for the couple Bismirkin and Burhanuddin Tajang.

Key words ; political campaign, civil servant, local election

Pendahuluan

Secara institusional PNS harus bersikap netral dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye tetapi sebagai warga negara mereka memiliki hak suara dan merupakan pemilih yang cukup strategis dan dapat memengaruhi anggota keluarganya dalam memenangkan suatu pemilihan sehingga berbagai cara ditempuh. Hal ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 68 dan pasal 69 yang berbunyi Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Soppeng sebanyak 5417 orang merupakan suara potensial dalam memenangkan suatu pemilihan kepala daerah. Sehingga sangat rasional kalau calon kepala daerah bersama partai politik dan tim suksesnya berusaha merebut suara tersebut. Segala carapun ditempuh lewat strategi kampanye politik khusus untuk pemilih PNS. Pendekatan yang dilakukan adalah lewat komunikasi interpersonal dan komunikasi massa lewat media radio dan koran, mengingat PNS secara institusi tidak boleh terlibat kegiatan kampanye politik. Tetapi tidak menutup kemungkinan kepala daerah/bupati yang sementara menjabat (incumbent) dan akan ikut pemilihan calon kepala daerah berikutnya pun memanfaatkan kesempatan lewat posisinya dalam mengontrol, mengampanyekan dirinya dan mengajak pegawai negeri sipil dengan menjadikan promosi jabatan dalam lingkup dinas sebagai strategi dalam meraih dukungan politik.

Meskipun pegawai negeri sipil dilarang menghadiri kegiatan kampanye politik dilapangan dalam bentuk mobilisasi massa, akan tetapi mereka tetap diterpa kampanye lewat komunikasi persuasif atau interpersonal seperti tatap muka antar pribadi atau kelompok, door to door, selebaran panflet, komunikasi lewat tokoh

masyarakat serta lewat media seperti koran dan radio.

Pada pelaksanaan pilkada di 10 Kabupaten di Sulawesi Selatan pada bulan Juli Tahun 2005 lalu, Kabupaten Soppeng salahsatu diantaranya memiliki keunikan tersendiri. Sehingga sangat menarik untuk penulis teliti dengan dasar pemikiran:

1. Pada pemilihan umum legislatif 2004 perolehan suara Partai Golkar di legislatif mencapai 50% atau mampu menempatkan anggotanya sebanyak 15 orang dari 30 jumlah keseluruhan anggota DPRD Kab. Soppeng.
2. Salahsatu pasangan calon kepala daerah yang juga berstatus incumbent yaitu Drs.H.A. Harta Sanjaya berpasangan Syarifuddin Rauf, SH diusung oleh Partai Golkar dikalahkan oleh pasangan Drs. A Soetomo berpasangan A.Sarimin Saransi yang diusung oleh partai Merdeka, PPNU, PAN, dan PSI kalau dipersentasekan jumlah suaranya di pemilu legislatif 2004 keseluruhannya hanya 16,6 %.(Sumber data KPUD Kab.Soppeng).
3. Satu-satunya pejabat bupati yang sekali-gus Ketua Partai Golkar Kab.Soppeng mengalami kekalahan pada pilkada langsung Tahun 2005.
4. Dikalangan pegawai negeri sipil, promosi jabatan atau mutasi pegawai dianggap oleh sebahagian masyarakat dan elit politik sangat rawan dimanfaatkan dari segi kepentingan politis apalagi yang menjadi kepala kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Soppeng masih keluarga/saudara kandung bupati. Sehingga dipersepsikan bisa memanfaatkan posisinya dalam memengaruhi pegawai negeri sipil.
5. Kabupaten Soppeng dikenal dengan Wanua Latemamala telah menganut prinsip-prinsip demokrasi dalam memilih suatu pemimpin.

Berdasarkan beberapa fenomena diatas, pada aspek inilah signifikannya masalah ini untuk dilakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk tesis. Sehingga lahirlah judul Analisis Kampanye Politik Pilkada Terhadap Sikap Pemilih Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Pada Pilkada Tahun 2005

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kampanye politik calon kepala daerah dalam memengaruhi sikap pemilih Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Pada Pilkada Tahun 2005?
2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap sikap pemilih Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng pada pilkada Tahun 2005?
3. Bagaimana sikap pemilih Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng pada pilkada Tahun 2005?

Kajian Konsep dan Teori

1. Kampanye Politik

Kampanye politik adalah salahsatu bentuk aktifitas dalam komunikasi politik. Menurut Cangara (2009:276) dalam konteks komunikasi politik, kampanye dimkasudkan untuk memobilisasi dukungan terhadap suatu hal atau seorang kandidat. Kampanye merupakan aktifitas komunikasi yang ditujukan untuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap, dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan pemberi informasi.

Menurut Sendjaja dkk (1994 : 25), dia menuliskan beberapa bentuk komunikasi, dimana komunikasi ini biasa digunakan dalam kampanye politik atau pemilu, yakni komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*), komunikasi kelompok (*group communication*), komunikasi organisasi (*organizational communication*), dan komunikasi massa (*mass communication*).

Menurut definisi kampanye yang dikutip dari Rogers dkk (dalam Berger dan Chaffee 1987:819) menyatakan bahwa:

“Communication campaign is preplanned set of communication activities designed to reach and motivate people using a particular type of message. Campaign are conducted far a short period (usually from one week to three months)with specific attitude and behavior

objectives. Always use a multimedia approach.” (Kampanye adalah sekumpulan rencana kegiatan komunikasi yang dirancang untuk meningkatkan dan memotivasi orang-orang terhadap suatu pesan. Kampanye dapat dilakukan dalam waktu yang singkat (biasanya satu bulan sampai tiga bulan) dengan sikap khusus dan perilaku yang obyektif. Dalam kampanye juga menggunakan pendekatan berbagai media atau multi media).

Kampanye politik pada dasarnya adalah penyampaian pesan-pesan dari pengirim kepada khalayak. Pesan-pesan tersebut dapat disampaikan dalam berbagai bentuk mulai dari poster, spanduk, baliho, pidato, diskusi, iklan hingga selebaran. Apapun bentuknya pesan selalu menggunakan symbol, baik secara verbal maupun non verbal yang dapat memancing respon khalayak. Tujuan dari kampanye politik hanya dapat dicapai bila khalayak memahami pesan-pesan yang ditujukan kepada mereka.

2. Konsep Sikap

Konsep sikap atau *“attitude”* dalam bahasa Inggris berarti keadaan sikap secara mental bersifat subyektif untuk melakukan sesuatu kegiatan. Krech, Crutchfield dan Ballachey mendefinisikan sikap sebuah sistem evaluasi positif atau negatif yang awet, perasaan-perasaan emosional, dan tendensi tindakan pro atau kontra terhadap sebuah obyek sosial. Allport mendefinisikan sikap sebagai kesiapan mental dan sistem syaraf, yang adiorganisasikan melalui pengalaman, menimbulkan pengaruh langsung atau dinamis pada respons-respons seseorang terhadap semua obyek dan situasi terkait. (Severin: 2005; 179).

Menurut Petty dan Caciappo (dalam Severin dan Tankard 2005:206), ada dua rute dalam model ini yaitu rute sentral dan rute periferal. Rute sentral dipakai ketika penerima secara aktif memproses informasi dan terbujuk oleh rasionalitas argumen.

Sementara rute periferal dipakai ketika penerima tidak mencurahkan energi kognitif untuk mengevaluasi argument dan memproses informasi didalam pesan dan lebih banyak dibimbing oleh isyarat-isyarat eksternal diantaranya kredibilitas sumber, gaya, dan format pesan, suasana hati penerima dan sebagainya.

3. *Pemilih Pegawai Negeri Sipil dan Politik di Indonesia*

Dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pegawai Negeri Sipil (2004) dikutip dari **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999** tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dijelaskan pada bab 1 pasal 1 ayat 1 bahwa;

Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada bab II tentang jenis, kedudukan, kewajiban dan hak pegawai negeri pada pasal 2 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa pegawai negeri terdiri dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Negara Republik Indonesia dan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah pegawai negeri sipil pusat, dan pegawai negeri sipil daerah. .

Membahas mengenai pegawai negeri sipil, secara otomatis birokrasi sebagai lembaga tidak bisa dipisahkan. Karena birokrasi sebagai personel tetap pemerintahan yang didalamnya terdapat unsur pegawai negeri sipil maupun militer. Bagi Weber, birokrasi merupakan bentuk organisasi paling rasional. Meskipun Weber menyadari kelemahan-kelemahan yang muncul dalam birokrasi, namun dia tetap percaya bahwa kebaikan-kebaikan yang

dihasilkan oleh birokrasi lebih banyak dibandingkan dengan kejelekan yang ditimbulkannya dengan dilatarbelakangi semangat kapitalisme.

4. *Teori Komunikasi*

Ada beberapa teori yang dapat dijadikan acuan dalam mengelaborasi proses penelitian ini yaitu:

a. *Teori Pemrosesan -Informasi*

Teori pemrosesan informasi Mc.Guire dalam Severin dan Tankard (2005;204) menyebutkan bahwa perubahan sikap terdiri dari enam tahap. Tahap-tahap tersebut adalah: Pertama, pesan persuasif harus dikomunikasi-kan.Kedua, penerima akan memer-hatikan pesan.Ketiga, penerima akan memahami pesan.Keempat, penerima terpengaruh dan yakin dengan argumen argumen yang disajikan.Kelima, tercapai posisi adopsi baru.Keenam, terjadi perilaku yang diinginkan.

b. *Teori Integrasi Informasi*

Littlejohn (1996: 186), mengemukakan teori *integrasi informasi* yang berfokus pada cara manusia mengakumulasikan dan mengorganisasi informasi mengenai orang, obyek, situasi, atau ide untuk membentuk sikap terhadap suatu konsep. Menurut teori ini, suatu sistem sikap individu dipengaruhi oleh informasi yang diterima dan digabungkan ke dalam sistem informasi sikap. Semua informasi memiliki potensi mempengaruhi sikap seseorang, tetapi tingkat pengaruh terhadap sikap tergantung pada 2 variabel yaitu: *Pertama* valensi, yaitu penilaian individu mengenai apakah informasi itu merupakan berita yang baik atau berita yang buruk. Baik-buruknya berita itu tergantung sikap dan kepercayaan seseorang. *Kedua*, bobot informasi, yaitu merupakan fungsi kredibilitas. Jika seseorang menganggap informasi itu benar,

maka informasi itu memiliki bobot yang lebih tinggi, demikian sebaliknya.

c. Model Kampanye Ostergard

Menurut Ostergaard sebuah program kampanye yang tidak didukung oleh temuan-temuan ilmiah tidaklah layak untuk dilaksanakan. Alasannya karena program semacam itu tidak akan menimbulkan efek apapun. Sehingga apapun tahapan kampanye harus dimulai dari identifikasi masalah secara jernih atau yang dikenal dengan prakam-panye. Tahap kedua adalah pengelolaan kampanye yang dimulai dari perancangan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap inilah seluruh isi program kampanye diarahkan untuk membekali dan memengaruhi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan khalayak. Selanjutnya model kampanye ini diakhiri dengan evaluasi efek program kampanye yang telah dilaksanakan.

Khususnya terkait dengan fenomena pemilihan kepala daerah Kabupaten Soppeng, Mallari (2005;15) menuangkan dalam suatu laporan penelitian bahwa faktor-faktor yang berpengaruh pada kemenangan dalam pilkada Soppeng, diantaranya metode kampanye, pola strategi dan politik yang diterapkan misalnya (adat, agama, Reputasi (berhasil atau tidak berhasil dalam pembangunan), ketokohan/figur, mesin birokrasi, jaringan keluarga, jaringan bisnis, mesin partai, jualan program/visi-misi, serta faktor-faktor lainnya. Laporan Penelitian ini menunjukkan bahwa peta dan strategi yang dilakukan oleh pasangan H. Andi Soetomo dan Andi Sarimin Saransi berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng 2005 dengan D. perolehan suara 40, 77 % mengungguli ketiga pasangan lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan dari bulan Oktober – Desember 2007. Lokasi penelitian berada di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Soppeng.

Berdasarkan tujuan penelitian maka tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif.

Populasi sampling meliputi keseluruhan responden/pemilih pegawai negeri sipil sebanyak 5417 ribu orang yang ada di wilayah penelitian dan terdaftar sebagai pemilih. Sedangkan populasi sasaran adalah responden yang menjadi fokus penelitian, dalam hal ini pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan dikantor sekretariat daerah pemerintah yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Soppeng Tahun 2005.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005 bahwa jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 5417 ribu orang termasuk didalamnya yang tersebar diberbagai kantor/instansi.

Mengingat keterbatasan waktu, dana dan tenaga serta sifat populasi penelitian, maka jenis sampel yang digunakan adalah sampel non-probabilitas dengan teknik penarikan sampling purposif. Teknik Pengumpulan Data; Survey, Dokumentasi. Observasi

Analisis Data, Bagian-bagian data yang diperoleh berdasarkan kategori akan diukur dan dihitung menurut frekuensi dan persentasenya. Frekuensi adalah dasar umum untuk melakukan perhitungan.

Rumus yang digunakan:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

dimana:

P = presentase

f = frekuensi klarifikasi atau kategori jawaban responden

n = jumlah responden yang kembalikan jawaban

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kabupaten Soppeng atau Wanua Latem-mamala merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan. Watan-soppeng yang merupakan ibu kota Kabupaten Soppeng berjarak sekitar 174 km arah utara dari Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Soppeng pada Tahun 2005 masih memiliki 7 (tujuh) wilayah administratif kecamatan, yakni Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Liriaja, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, dan Kecamatan Marioriawa. Dari ketujuh wilayah kecamatan ini terdapat 21 kelurahan, 45 desa, 42 lingkungan, 104 dusun, dengan jumlah RK sebanyak 394 dan 1.282 RT.

1. Identitas Responden

Jenis kelamin responden dalam penelitian ini adalah pemilih pegawai negeri sipil kantor sekretariat daerah Kabupaten Soppeng pada umumnya jenis kelamin laki-laki sebanyak 84 (60,0%) orang dan perempuan sebanyak 56 (40,0%) orang.

Jumlah anggota rumah tangga responden tergambarkan dalam penelitian ini memiliki jumlah keluarga dalam rumah tangga 1 – 3 orang sebanyak 74 (52,9%), 4-6 orang sebanyak 28 (20,0%) dan yang tidak menjawab 38 (27,1%).

Umur responden sebanyak 140 orang dalam penelitian ini semuanya sudah melewati umur 17 tahun sehingga sudah memenuhi salahsatu syarat untuk terdaftar

sebagai pemilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung Tahun 2005 di Kabupaten Soppeng.

Bila dilihat secara keseluruhan tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan SD sebanyak 7 orang (5,0%), SMP 5 orang (3,6%), SMU 41 orang (29,3%), Diploma 15 orang (10,7%), Strata 1 sebanyak 60 orang (42,9%) dan Magister/S2 sebanyak 12 orang (8,6%).

2. Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2010

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Soppeng selaku pelaksana kegiatan pemilihan kepala daerah (pilkada) berdasarkan surat DPRD Nomor : 113/DPRD/III/2005 tanggal 2 Maret 2005.

Kecamatan Marioriwawo memiliki 112 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah pemilih 32.148 orang. Pemilih yang menggunakan hak suaranya 25.223 orang di tambah 115 pemilih dari TPS lain, sedangkan pemilih yang tidak menggunakan haknya sebanyak 6.925. Ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat mencapai 78,81 persen.

Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Liriaja adalah 95 buah dimana jumlah pemilih tetap sebanyak 25.684 orang. Pada saat pencoblosan, sebanyak 20.093 orang yang menggunakan hak suara ditambah 113 pemilih dari TPS lain. Ini berarti ada 5.591 orang yang tidak menggunakan hak politiknya sehingga tingkat partisipasi masyarakat di kecamatan ini dalam pilkada Soppeng mencapai 78,67 persen.

Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Lilirilau berjumlah 113 buah dengan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 30.295 orang. Pemilih yang menggunakan hak suaranya berjumlah 23.150 ditambah 186 pemilih dari TPS lain, sedangkan yang tidak menyalurkan hak politiknya berjumlah

7.145 orang. Berdasarkan jumlah ini, maka persentase tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Lilirilau mencapai 77,02 persen.

Kecamatan Lalabata memiliki Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 109 buah. Jumlah pemilih tetap yang terdaftar sebanyak 29.887 orang. Dari sekian pemilih ini, ternyata yang menggunakan hak suaranya adalah 24.335 ditambah 338 orang dari TPS lain, sedangkan yang tidak ikut memilih 5.552 orang. Tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Lalabata pada pilkada Soppeng mencapai 82,55 persen.

Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Ganra mencapai 32 buah dengan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 8.744 orang. Pemilih yang tidak ikut menyalurkan hak suaranya sebanyak 1.913, sedangkan jumlah pemilih yang ikut berpartisipasi mencapai 6.831 orang ditambah 114 pemilih dari TPS lain. Ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat mencapai 79,42 persen.

Pemungutan suara di Kecamatan Donri-Donri berlangsung di 65 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah pemilih 17.214. Pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya berjumlah 3.143 orang, sedangkan yang menyalurkan hak suaranya sebanyak 13.986 dan 85 orang dari TPS lain. Ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Donri-Donri mencapai 81,74 persen.

Kecamatan Marioriawa memiliki 73 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah pemilih yang terdaftar 20.594 orang. Kenyataan pada hari pencoblosan bahwa ternyata 3.827 orang yang tidak memilih, sedangkan yang menggunakan hak suaranya berjumlah 16.767 orang ditambah 64 pemilih dari TPS lain. Ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Marioriawa pada pilkada Kabupaten Soppeng mencapai 81,72 persen.

Dalam proses pemilihan kepala daerah ketika hari pencoblosan berlangsung

ternyata selain 165.253 warga masyarakat yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), ternyata masih ada 328 orang yang memiliki hak suara tetapi belum terdaftar dan mereka ini tetap diakomodir oleh KPPS setempat untuk ikut memilih dengan menunjukkan identitas dirinya. Jadi total pemilih adalah **165.581** orang, dengan 131.400 pemilih diantaranya menggunakan hak suaranya, sedangkan 34.181 masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada Soppeng mencapai **79,35** persen.

Berdasarkan persebaran suara pada masing-masing kandidat, maka diperoleh data sebagai berikut :

1. Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh suara 52.934 (40,48 %).
2. Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh suara 45.386 (34,71 %).
3. Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh suara 20.804 (15,91 %).
4. Pasangan Nomor Urut 4 memperoleh suara 11.641 (8,90 %).

Dengan hasil ini, maka Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Soppeng menetapkan **Drs. H. Andi Soetomo, M.Si. sebagai Bupati** dan **Drs. Andi Sarimin Saransi sebagai Wakil Bupati** Periode 2005 – 2010 di mana pelantikan diselenggarakan pada tanggal 2 Agustus 2005. Menurut hasil analisis penulis bahwa sedikitnya ada 7 (tujuh) faktor keunggulan pasangan terpilih dibandingkan kandidat pasangan lainnya, yakni :

1. Piawai memanfaatkan sarana dan prasarana komunikasi kampanye.
2. Mampu membangun kepercayaan dan memotivasi para pemilih.
3. Konsisten dalam menyampaikan pesan-pesan politik.
4. Tim Kampanye kompak dan solid dalam mengkampanyekan kandidat yang diusungnya.

5. Harapan sebagian besar pemilih ada-lah terjadinya perubahan kepemimpinan.
6. Materi kampanye yang dikomunikasikan ke tengah-tengah masyarakat mencakup semua isu sentral yang sementara berkembang di masyarakat Soppeng.
7. Menjadi tempat pelarian dan menaruh harapan para PNS, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya yang kecewa kepada pejabat *incumbent*.

3. Bentuk Kampanye Politik Calon Kepala Daerah Dalam Meme-ngaruhi Sikap Pemilih Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Pada Pilkada Tahun 2005

Salah satu komponen yang turut menentukan kesuksesan kandidat memenangkan pertarungan dalam pilkada adalah kepiawaian tim sukses. Karakter dan perilaku tim sukses yang sesuai dengan selera kelompok pemilih tertentu dapat menarik simpati, sebagaimana yang dilakukan para tim sukses kandidat bupati/wakil bupati Kabupaten Soppeng dalam menggaet suara para Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tim kampanye kandidat pasangan nomor urut 1 dalam memanfaatkan media komunikasi kampanye terkesan monoton karena sangat mengandalkan pendekatan jaringan keluarga dan hubungan persahabatan dalam bentuk kampanye *door to door*, posko pemenangan sangat terbatas, penyebaran alat kampanye kurang dilakukan, arak-arakan dan pengerahan massa berlebihan tidak ada. Dengan kampanye *door to door*, tim kampanye boleh dikatakan mampu membangun kepercayaan dan motivasi calon pemilih yang ditemuinya serta beban biaya juga rendah, tetapi jangkauan pengaruhnya terbatas pada mereka yang hadir dan penyebaran informasinya tidak merata dan hanya terfokus pada kelompok masyarakat tertentu.

Aspek konsistensi pesan politik yang dikampanyekan berupa propo-ganda, yakni “*ingin menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai kota pendidikan, wisata, dan budaya*” oleh tim kampanye bisa dikatakan tinggi dan ini mampu menarik perhatian masyarakat. Kelebihan kandidat ini dan tim kampanyenya adalah menghindari segala bentuk *black campaign* dan hanya fokus membangun pencitraan mereka sendiri. Namun demikian kalau ditinjau dari aspek kekompakan tim kampanye terkesan agak kurang. Ini terbukti ketika dilakukan kampanye terbuka di Lapangan Gasis Watansoppeng, tim kampanye gagal memobilisasi massa sehingga orang-orang yang hadir sedikit saja.

Kandidat nomor urut 2 adalah pasangan *incumbent* dimana tim kampanyenya piawai dalam memanfaatkan sarana dan prasarana komunikasi kampanye termasuk dalam bentuk penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik. Dalam mensosialisasikan tema-tema kampanye, diantaranya “*Mengutamakan peningkatan kualitas, kesempatan dan pemerataan pendidikan,*” tim kampanye mahir melakukan variasi-variasi strategi dan metode kampanye yang mampu menarik perhatian masyarakat. Tim kampanye juga mampu bekerja maksimal dalam mempengaruhi dan memotivasi masyarakat pemilih. Adapun pesan-pesan politik yang disampaikan cenderung variatif karena harus menghadapi isu-isu yang diangkat oleh pesaing terkuatnya, yakni kandidat pasangan nomor urut 3.

Posko-posko pemenangan tersebar merata pada tiap-tiap kecamatan dan desa. Biaya yang harus dikeluarkan tim kampanye untuk melakukan berbagai inovasi dan kreatifitas pemenangan boleh dikatakan besar. Hanya saja kandidat nomor urut 2 beserta tim kampanyenya sering melakukan *black campaign*, khususnya dalam menghadapi intrik-intrik kandidat nomor urut 3. Kelemahan yang juga muncul pada

tim kampanye nomor urut 3 ini karena seharusnya mesin partai pengusung, yakni Partai Golkar utuh memenangkan kandidat pasangan nomor urut 2, namun kenyataannya sebagian kader dan fungsionaris partai menyeberang ke kandidat pasangan nomor urut 3. Mengatasi kelemahan ini, maka pasangan kandidat ini memaksimalkan mesin informal, yakni birokrasi dan jaringan keluarga. Sinergi antara mesin informal ini dengan mesin formal partai ternyata sukses menggiring massa dalam jumlah yang sangat banyak yang mencapai sekitar 7.000 orang ketika kampanye terbuka di Lapangan Gasis Watansoppeng dilakukan.

Kepiawaian dan kemampuan tim kampanye kandidat nomor urut 3 dari segi strategi, metode, inovasi, kreatifitas tidak kalah dari tim kandidat nomor urut 2. Kelebihan tim kampanye kandidat nomor urut 3 ini karena mampu mengusung propaganda kampanye yang mencakup seluruh isu sensitif yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, seperti: *“Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, Identifikasi dan penyelamatan aset-aset daerah, Peningkatan kompetensi PNS.*

Tim kampanye konsisten menyosialisasikan tema yang diusung dan tema tersebut dapat tersosialisasi merata ke segenap pelosok Kabupaten Soppeng. Jangkauan sosialisasi ini dimungkinkan karena posko pemenangan tersebar di semua kecamatan dan tim pemenangan aktif bekerja mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, hingga ke desa-desa. Tim juga giat menyebarkan informasi kampanye melalui media cetak dan elektronik. Kelemahan kandidat nomor urut 3 karena tim kampanyenya sering terlibat *black campaign* dalam menghadapi tim kandidat nomor urut 2 yang merupakan pesaing terkuatnya.

Kandidat nomor urut 3 dijadikan tempat pelarian orang-orang dari berbagai

profesi yang merasa diperlakukan tidak adil oleh kandidat *incumbent* sehingga tim kampanye leluasa memanfaatkan mereka dan ini merupakan suatu keuntungan dalam hitung-hitungan politik. Tim kampanye yang terlibat, baik dari jaringan formal partai maupun non formal berupa jaringan keluarga dapat berjalan beriringan dan kompak mengusung kandidat nomor urut 3. Kekompakan tim kampanye terbukti ketika massa kandidat nomor urut 3 ini membludak yang melebihi 10.000 orang dalam kampanye terbuka di Lapangan Gasis Watansoppeng.

Diantara kandidat bupati/wakil bupati Soppeng yang maju bertarung, hanya kandidat nomor urut 4 ini yang tidak sempat menyiapkan mesin pemenangannya secara maksimal, termasuk tim kampanye. Ini disebabkan karena lambatnya pasangan ini terbentuk dan ada sinyalemen bahwa partai-partai yang mengusungnya hanya sebatas pintu atau kendaraan politik saja sehingga fungsionaris dan simpatisan partai-partai pengusung tidak terlalu memaksimalkan dirinya bekerja.

Tim kampanye dalam menggunakan sarana dan prasarana komunikasi kampanye sangat monoton dengan mengandalkan penyebaran brosur, sticker, foto, pamlet, dan lain-lain yang dilakukan dengan cara berkeliling dari satu desa ke desa lainnya. Strategi dan metode lain yang dilakukan tim kampanye kandidat ini hampir mirip dengan tim kampanye nomor urut 1, diantaranya pendekatan *door to door* dengan masyarakat pemilih. Hanya saja harus diakui bahwa tim kampanye mengalami berbagai kesulitan karena figur kandidat nomor urut 4 ini kurang populer di masyarakat apalagi mesin partai dan jaringan keluarga tidak bekerja maksimal. Namun demikian tim kampanye kandidat ini dalam kampanye terbuka mampu menghadirkan sekitar 3.000 simpatisan termasuk artis ibu kota di Lapangan Gasis, Watansoppeng.

Proses pelaksanaan pilkada langsung Tahun 2005 yang lalu tetap mendapatkan perhatian tersendiri dikalangan pegawai negeri sipil di kantor sekretariat daerah Kabupaten Soppeng. Sebagai warga negara yang memiliki hak pilih mereka memberikan penilaian tersendiri terkait dengan kampanye politik dalam bentuk komunikasi massa dan interpersonal yang telah dilakukan pasangan calon bupati dan wakil bupati beserta tim suksesnya meskipun mereka tidak terlibat.

Tingkat ketertarikan para responden pada bentuk penilaian kampanye politik dalam bentuk komunikasi massa sebanyak 50 orang atau 35,7% melihat bahwa spanduk, pamflet, brosur, baliho sangat strategis. Disusul forum diskusi/dialog sebanyak 40 orang atau 28,6 %. Selanjutnya pelaksanaan rapat akbar sebanyak 25 orang atau 17,9 %. Yang pernah membaca di surat kabar sebanyak 22 orang atau 15,7%. Untuk pelaksanaan kampanye di radio dan televisi hanya 3 orang atau 2,1% yang pernah mendengar dan menontonnya. Hal ini menempati posisi terendah bila dibandingkan seluruh pilihan jawaban responden.

Sebanyak 65 orang responden atau 46,40 % menilai kampanye politik dalam bentuk komunikasi massa dilakukan oleh para kandidat calon kepala daerah dilakukan lebih dari 5 kali. Sedangkan 43 orang atau 30,70 % melihat hanya sampai 4 kali. Sementara penilaian responden yang melihat para kandidat calon kepala daerah atau tim sukses mempergunakan komunikasi massa sebanyak 2 kali hanya 32 orang atau 22,90% saja.

Ketertarikan responden sebanyak 72 orang atau 51,4% pada penampilan pribadi yang dilakukan para calon kepala daerah. Urutan berikutnya dengan mendatangi tokoh pemuka pendapat/masyarakat responden menilai sebanyak 36 atau 25,7% selanjutnya ketika kandidat atau tim sukses

melaksanakan anjingsana penilaian responden sebanyak 32 orang atau 22,9% .

Sebanyak 45 orang responden atau 32,1 % menilai kampanye politik dalam bentuk komunikasi interpersonal dilakukan oleh para kandidat calon kepala daerah dilakukan lebih dari 5 kali. Sedangkan 67 orang atau 47,9 % melihat hanya sampai 4 kali. Sementara penilaian responden yang melihat para kandidat calon kepala daerah atau tim sukses mempergunakan komunikasi interpersonal sebanyak 2 kali hanya 28 orang atau 20% saja.

Hal yang menarik pada tabel 25 menunjukkan ketika responden diminta untuk memberikan sikap terkait pada 2 bentuk komunikasi politik pada saat kampanye pilkada tahun 2005 lalu, sebanyak 93 orang atau 66,4% menilai bahwa komunikasi interpersonal lebih strategis bila dibandingkan dengan komunikasi massa yang ditunjukkan dengan 47 orang atau 33,6% yang menentukan sikapnya.

4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Sikap Pemilih Pegawai Negeri Sipil Kantor Sekretariat Daerah Kab.Soppeng Pada Pilkada Tahun 2005

Berikut adalah data dari 140 responden beserta jumlah dan persentase masing-masing faktor dalam menentukan sikap politiknya dalam memilih pada pilkada tahun 2005.

Kecenderungan pemilih pegawai negeri sipil sekretariat daerah sebanyak 140 orang, menyalurkan hak pilihnya pada pelaksanaan pilkada Tahun 2005 lebih banyak didasarkan kepada faktor kepentingan karir sebanyak 42 orang atau 30 %.

Untuk faktor kredibilitas/pencitraan kandidat, pemilih pegawai negeri sipil sekretariat daerah Kab.Soppeng memilih sebanyak 24 orang atau 17,14%. Sedangkan yang menyatakan dari aspek program yang

ditawarkan atau visi dan misi kandidat sebanyak 22 orang atau 15,71 %. Dari faktor efektifitas informasi/kampanye, sebanyak 27 orang atau 19,28 % yang memilih. Terkait pengaruh keluarga, tetangga, teman sejawat sebanyak 20 orang atau 14,28 % yang memberikan penilaian. Sedangkan faktor-faktor lainnya sebanyak 5 orang atau 3,59 % dijadikan dasar pertimbangan. Kenyataan diatas menunjukkan bahwa dari 140 responden, ternyata mayoritas dari jawaban responden menempatkan faktor kepentingan karir pada urutan pertama, baru kemudian efektifitas informasi kampanye diurutan kedua, dan pertimbangan ketiga adalah kredibilitas pencitraan kandidat.

5. Sikap Pemilih Pegawai Negeri Sipil Kantor Sekretariat Daerah Kab. Soppeng Pada Pilkada Tahun 2005

Sebagai warga negara yang memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pilkada Tahun 2005, para pemilih pegawai negeri sipil yang berkantor di sekretariat daerah Kabupaten Soppeng punya penilaian tersendiri dalam menentukan sikapnya. Untuk mengetahui tanggapan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Para pegawai negeri sipil sekretariat daerah Kabupaten Soppeng memilih bukan karena dipaksa atau diminta oleh atasan di kantor, hal ini dilihat dari 95% atau 133 orang menyatakan tidak pernah dipengaruhi oleh atasan sedangkan hanya 7 orang atau 5 % menyatakan pernah dipengaruhi.

Responden ketika diminta tanggapannya terkait dengan sikapnya dalam memilih pada pelaksanaan pilkada Tahun 2005 lalu sebanyak 46 orang atau 32,9% memilih pasangan nomor urut 2 yaitu A.Soetomo dan A.Sarimin Saransi, kemudian 42 orang atau 30,0% memilih A.Harta sanjaya dan Syarifuddin Rauf yang merupakan pasangan incumbent, kemudian pasangan A.Munarfa dan A.Rizal Mappatunru sebanyak 18 orang

atau 12,9% sementara untuk pasangan Bismirkin dan Burhanuddin Tajang sebanyak 4 orang atau 2,9% yang memberi penilaian. Hal yang menarik adalah sebanyak 30 orang atau 21,4% tidak memberikan jawaban. Ini tidak berarti mereka tidak memilih pada pilkada lalu tetapi kemungkinan mereka merahasiakan pilihannya dengan tidak memberikan jawaban.

Kesimpulan

1. Bentuk kampanye politik yang dilakukan calon kepala daerah ber-sama tim suksesnya dalam me-mengaruhi sikap pemilih pegawai negeri sipil kantor sekretariat daerah Kab. Soppeng adalah melakukan dua bentuk komunikasi politik yaitu komunikasi massa dan interpersonal. Penilaian responden terhadap dua bentuk komunikasi politik tersebut menunjukkan bahwa komunikasi interpesonal dengan cara penampilan pribadi kandidat, menemui tokoh masyarakat, dan melakukan anjang-sana lebih strategis dibandingkan dengan komunikasi massa.
2. Faktor-faktor yang dominan me-mengaruhi terhadap sikap pemilih pegawai negeri sipil kantor sekretariat daerah Kabupaten Soppeng dalam menentukan sikap memilih pada pilkada Kabupaten Soppeng, yakni pertama, aspek kepentingan karir, kedua, kredibilitas /pencitraan kandidat, ketiga program yang tawarkan kandidat, keempat efek-tifitas informasi/kampanye, kelima, pengaruh keluarga, tetangga, teman sejawat dan terakhir faktor lainnya seperti keinginan sendiri tanpa target tertentu.
3. Sebagai warga negara yang memiliki hak pilih yang dijamin oleh undang-undang, sikap pemilih pegawai negeri sipil kantor sekretariat daerah Kabupaten Soppeng

pada pelak-sanaan pilkada Tahun 2005, mereka menyalurkan hak suaranya kepada pasangan calon A. Soetomo dan A. Sarimin Saransi, disusul responden menentukan sikap ke A.Harta Sanjaya dan Syarifuddin Rauf. Berikutnya responden memilih pasangan A.Munarfah Mappu dan A.Rizal Mappatunru, Terakhir untuk ke pasangan Bismirkin dan Burhanuddin Tajang. Hal yang menarik pertama, adalah responden ada yang tidak memberikan jawaban dengan menempati posisi diurutan ketiga dari presentase pilihan. Kedua, terkait dengan pengaruh atasan dalam menentukan sikap pemilih juga tidak terbukti karena mayoritas responden menyatakan tidak pernah dipengaruhi oleh atasan. Ketiga, pasangan A.Harta Sanjaya dan Syarifuddin Rauf sebagai bupati dan wakil bupati incumbent selaku simbol kepala pemerintahan yang berkantor di sekretariat daerah Kabupaten Soppeng dikalahkan oleh pasangan A.Soetomo dan A.Sarimin Saransi pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2005.

Daftar Pustaka

- Azwar, Saifuddin, 1988. *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*, Liberty. Yogyakarta
- Berger, Charles, R & Steven, H. Chaffes. 1987. *Handbook of Communication Science*. Sage Publication : London.
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik (Konsep, Teori dan Strategi)*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Dahl, A Robert. *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Heaven: Yale University Press, 1971)\
- Gany, A. Hafied dan Ulum A. Gany (ed.). 2003. *Perspektif Pengembangan Kabupaten Soppeng Dalam Rangka Mensukseskan Otonomi Daerah*. Rewe Sipulung, Bandung.
- Giddens, Anthony. 1994. *Beyond Left and Right*. Terjemah Imam Khoiri. 2003. Cet. Pertama. IRCiSoD, Yogyakarta.
- Gaffar, Affan. 2002. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Cet.III Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Hyman, H.H. and Sheatsley, Paul. 1971. *Some Reasons Why Information Campaigns*. Faip.in.Wilbur Schramm and Donald, F.R. (eds). *The Process and Effects of Mass Communication*. Chicago : University of Illinois Press.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, 2005. *Laporan Penyelenggaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Soppeng Tahun 2005*. Laporan KPUD Soppeng.
- Kriyantono, Rahmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*.Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Littlejohn, W. Stephen. 1996. *Theories of Human Communication*. Humboldt State University, AS.
- Liddle, R. William, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1992.
- McQuail, Denis. 1987. *Teori Komunikasi Massa : Suatu Pengantar*. Terjemahan Agus Dharma & Aminuddin. 1989. Edisi Kedua. Erlangga : Jakarta.
- McQuire, W.J. 1981. *Theoretical Foundations of Campaigns*, in. R. E Richard W.J. Paisley, (eds). *Public Communications Campaigns*. Beverly Hills : Sage Publication.
- Nimmo, Dan. Tanpa Tahun. *Komunikasi Politik*. Terjemahan Tjun Surjaman. 1999. Cet. Ketiga PT.Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Palombara, La, 1967,*Beraucracy and Political Development*, Pricenton, New York.
- Rogers, Everett and Storey . J.D. 1987. *Communication Campaigns*. m.CR. Berger and S.H. Chaffee, (eds) *Handbook of Communication Science*. London : Sage Publication.
- Rizal, Syamsu. 2006. *Pengaruh Akseptabilitas dan Citra Calon Bupati Dikalangan Pemilih dalam Pilkada Langsung 2005 di Kabupaten Soppeng*. Tesis Pascasarjana Unhas.
- Sendjaja, Djuarsa.S. 1994. *Teori Komunikasi*. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sumange, Hary. 2002. *Sejarah Soppeng*. Yayasan Bina Budaya Soppeng, Makassar.